BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Resiliensi

a. Definisi Resiliensi

Banyak tokoh yang menjelaskan tentang definisi Resiliensi. Berikut ini dipaparkan pengertian Resiliensi dari beberapa ahli.

Resiliensi adalah suatu proses modifikasi respon untuk perlindungan diri terhadap situasi-situasi sulit yang beresiko pada titik krisis yang berkepanjangan.[1]

Resiliensi merupakan karakter positif yang diharapkan dapat mengatasi suatu krisis. Resiliensi itu adalah langkah protektif atau perlindungan baik internal dan eksternal untuk mengatasi stress, memecahkan masalah, menyelesaikan konflik dan menguasai seluruh tugas perkembangan. Resiliensi itu suatu proses yang dinamis untuk membantu beradaptasi dalam masalah yang signifikan.[2]

Resiliensi adalah suatu kemampuan untuk bangkit kembali dari penderitaan, untuk berubah menjadi lebih kuat dan memiliki sumber daya, resiliensi tidak hanya soal kemampuan untuk bertahan (*survive)*

[1] Zahroh, N. F. (2017). *Pengaruh bimbingan agama terhadap tingkat resiliensi warga binaan lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II A Cipinang Jakarta Timur* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017). Newcomb (LaFramboise Teresa. D. 2006:194)

[2] Yumpi-R, F., & Danan Satriyo, W. (2017). Resiliensi Keluarga Dengan Anak Gangguan Disintegratif Melalui Konseling Kelompok. *Jurnal Insight*, *13*(1). (Dankonski dkk, 2006)

tetapi juga kekuatan untuk memampukan orang agar sembuh dari luka yang menyakitkan, mengendalikan hidupnya dan melangsungkan kehidupannya dengan penuh cinta dan kasih sayang.[3]

Resiliensi yakni kemampuan seseorang individu untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang sulit sehingga individu tersebut dapat terlindungi dari efek negative, resiko dan kemalangan ataupun tekanan. Pengukuran resiliensi secara individu menggunakan tujuh aspek, masing-masing aspek tersebut adalah : regulasi emosi, aspek kontrol terhadap impuls, aspek optimisme, aspek kemampuan menganalisis masalah (*causal analysis)*, aspek empati, aspek efikasi diri, dan aspek pencapaian (*reaching out)*.[4]

Resiliensi yaitu suatu kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi pada suatu keadaan yang berat atau masalah yang terjadi pada kehidupan. Upaya untuk bertahan dalam keadaan tertekan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan (adversity)[5]

Resiliensi juga biasa disebut sebagai kemampuan untuk mempertahankan keadaan psikologis untuk tetap stabil pada saat menghadapi stress.[6]

---

[3] Yumpi-R, F., & Danan Satriyo, W. (2017). Resiliensi Keluarga Dengan Anak Gangguan Disintegratif Melalui Konseling Kelompok. *Jurnal Insight*, *13*(1).

[4] Suryaman, M. A., Stanislaus, S., & Mabruri, M. I. (2018). Pengaruh religiusitas terhadap resiliensi pada pasien rehabilitasi narkoba yayasan rumah damai semarang. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, *6*(2), 98-103.

[5] Septiani, T., & Fitria, N. (2016). Hubungan antara resiliensi dengan stres pada mahasiswa sekolah tinggi kedinasan. *Jurnal Penelitian Psikologi*, *7*(2), 59-76.

[6] Utami, C. T. (2017). Self-efficacy dan resiliensi: Sebuah tinjauan meta-analisis. *Buletin Psikologi*, *25*(1), 54-65.

Resiliensi secara keseluruhan adalah suatu pola adaptasi positif ketika dan sesudah mengalami suatu kesulitan atau resiko. Suatu ide yang dinamis untuk bertahan atau pulih dari gangguan.[7]

Resiliensi adalah suatu kehidupan. Semua sepakat bahwa pengembangan diri pribadi dapat dikembangkan dengan cara mengubah keadaan yang penuh tekanan menjadi suatu kesempatan untuk pengembangan diri.[8]

Istilah Resiliensi berasal dari bahasa latin resilire yang berarti melambung kembali. Istilah tersebut pada masa permulaan khusus digunakan dalam bidang ilmu fisik dan fisika. Resiliensi dapat diartikan suatu kemampuan agar pulih kembali dari suatu keadaan, kembali ke bcntuk semula, ditekan, atau diregangkan. Dalam ilmu psikologi, resiliensi adalah kemampuan setiap orang untuk cepat sembuh, pulih dari perubahan, sakit, kesialan, atau kesulitan. Istilah resiliensi pada awalnya diformulasikan dengan sebutan egoresilience, yang artinya suatu kemampuan umum yang mengikutsertakan penyesuaian diri yang luwes dan tinggi ketika dihadapkan pada tekanan internal dan eksternal.[9]

Resiliensi merupakan sarana yang digunakan untuk mempertahankan kemampuan yang berguna secara kompeten dalam menghadapi masalah kehidupan. Resiliensi dapat kita artikan sebagai

[7] Yulianingsih, D. (2021). Momen Merajut Asa. *Dampak Covid-19 Terhadap Kebijakan Pendidikan di Indonesia: antara Idealisme dan Realitas*, 87.

[8] Rojas, L. F. (2015). Factors affecting academic resilience in middle school students: A case study. *Gist: Education and Learning Research Journal*, (11), 63-78.

[9] ("Al Siebert Resiliency Center » Resiliency Definitions," n.d.) (Punamäki, Qouta, El Sarraj, & Montgomery, 2006)

kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri , dan kapasitas seseorang untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah setelah dan kesulitan dalam kehidupan. [10]

b. Komponen-Komponen Resiliensi

Pada buku Financial System Resilience Index, resiliensi mempunyai tujuh komponen. Hal ini merupakan hasil dari pada kebijakan sastra dan serangkaian wawancara dari para ahli di meja bundar, ditemukan adanya tujuh faktor kunci resiliensi yang mempengaruhi sistem ketahanan, ke tujuh komponen yang dapat diukur itu bisa dilihat pada uraian dibawah ini[11] :

1. Keanekaragaman (*Diversity*)

   Yaitu adanya keanekaragaman pelaku yang menempati berbagai unit yang berbeda dalam suatu sistem dan menerapkan strategi yang berbeda untuk sebuah perkembangan hal ini merupakan suatu sistem yang sehat.

2. Keterkaitan Dan Struktur Jaringan (*Interconnectedness And Network Structure)*

   Cara suatu lembaga keuangan terhubung satu sama lain juga mempengaruhi cara penyebaran krisis.

[10] Hendriani, W. (2018). *Resiliensi psikologis: sebuah pengantar*. Kencana.

[11] Berry, C., Ryan-Collins, J., & Greenham, T. (2015). Financial System Resilience Index: Building a Strong Financial System. *New Economics Foundation*.

3. Ukuran Sistem Keuangan (*Financial System Size*)

   Sistem keuangan yang relatif besar yang mempunyai pengaruh terhadap ekonomi domestik, hal ini menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap stabilitas ekonomi.

4. Komposisi Asset *(Asset Composition)*

   Dengan mempunyai beberapa jenis asset, maka keuangan sangat rentan terhadap ledakan dan kehancuran.

5. Komposisi Kewajiban (*Liability Composition)*

   Pinjaman jangka pendek dari bank lain lebih berubah-ubah dan tidak stabil daripada simpanan nasabah.

6. Kompleksitas Dan Transparansi (*Complexity And Transparency)*

   Kompleksitas yang berkembang terkait dengan sekuritisasi dan pemotongan-pemotongan pinjaman dapat menyebarkan risiko di sekitar jaringan keuangan dan membuat risiko tersebut lebih sulit untuk dinilai, terutama selama krisis.

7. Rasio (*Leverage*)

   Antara aset bank dan modalnya ini telah menjadi fokus utama dari regulasi keuangan pasca krisis.

2. Manajemen Keuangan Syariah

Pada dasarnya manajemen keuangan mempunyai dua unsur kata yaitu manajemen dan keuangan. Kata manajemen (*management*) memiliki beberapa arti, hal ini tergantung pada konteksnya. Manajemen yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, kepemimpinan, dan

pengontrolan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif dan efisien.[12]

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sedangkan untuk Pengertian keuangan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan dari pengelolaan keuangan. Keuangan merupakan ilmu dalam mengelola uang yang berpengaruh terhadap kehidupan setiap orang dalam suatu organisasi.[13]

Dari uraian pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Manajemen Keuangan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan terhadap dana yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Manajemen keuangan menurut beberapa pendapat para ahli, yaitu :

1. Manajemen Keuangan adalah suatu proses untuk melakukan kegiatan mengelola keuangan dengan cara menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut bisa dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban.[14]

[12] Berry, C., Ryan-Collins, J., & Greenham, T. (2015). Financial System Resilience Index: Building a Strong Financial System. *New Economics Foundation*.

[13] Gitman, L. J. (2003). *Study guide to accompany Lawrence J. Gitman Principles of managerial finance, brief*. Addison Wesley.

[14] *Maesaroh*, S., & Rahayu, Y. (2015). Pengaruh Modal Intelektual terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *4*(11).

2. Manajemen Keuangan adalah pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi-fungsi keuangan itu sendiri adalah kegiatan utama yang harus dilakukan oleh pelaku-pelaku yang bertanggung jawab pada suatu bidang tertentu[15].

Berdasarkan pada beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen Keuangan adalah suatu proses pengaturan terhadap fungsi-fungsi keuangan oleh ketatausahaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pertanggungjawaban keuangan.

a. Konsep Dasar Manajemen Keuangan Syariah

1. Pengertian Manajemen Syariah

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah. Idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran.* Pengamat bahasa menilai pengambilan kata yang kedua, yaitu *adarta bihi*. Oleh karena itu, dalam *Elias Modern Dictionary English Arabic* kata *management* (Inggris), sepadan dengan kata *tabdir, idarah, siyasah,* dan *qiyadah* dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran, tema-tema tersebut hanya ditemui tema *tabdir* dalam berbagai definisinya. *Tabdir* adalah bentuk

[15] Husnan, S. (2019). Pengertian dan Konsep-Konsep Dasar Keuangan. *S. Husnan, Modul Manajemen Keuangan. Jakarta: Universitas Terbuka*.

masdar dari kata kerja *dabbara, ydabbiru, tabdiran. Tabdir* berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan.[16]

Secara istilah, beberapa pengamat mengartikannya sebagai alat yang digunakan untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu, menurut mereka, *idarah* (manajemen) adalah aktivitas khusus terkait kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu organisasi untuk tercapainya suatu tujuan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas, secara implisit dapat diketahui bahwa hakikat manajemen yang terkandung dalam Al-Quran adalah mengartikan atau memandang ke depan suatu urusan (persoalan) agar persoalan itu terpuji dan baik akibatnya. Untuk menuju hakikat tersebut diperlukan adanya pengaturan dengan cara yang bijaksana.[17]

Manajemen dikatakan telah memenuhi syariah apabila[18] :

a. Mengedepankan perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan.
b. Mengutamakan adanya struktur organisasi.
c. Mengulas tentang sistem. Sistem ini disusun supaya perilaku-pelaku di dalamnya berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan

[16] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah.
[17] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah.
[18] Hafidhuddin, D. (2003). *Manajemen syariah dalam praktik*. Gema Insani.

Umar bin Abdul Aziz, misalnya, merupakan salah satu contoh sistem yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi, dan control. Islam pun telah mengajarkan jauh sebelum adanya konsep itu lahir.

Syari'ah memandang manajemen dari dua sisi yakni sebagai berikut[19].

a. Manajemen Sebagai Ilmu

Sebagai ilmu, manajemen dinilai sebagai salah satu dari ilmu umum yang lahir berdasarkan fakta empiris yang tidak berhubungan dengan nilai dan peradaban (*hadharah*) mana pun. Sebagai ilmu, manajemen meupakan sesuatu yang bebas nilai atau mempunyai hukum asal yaitu mubah. Konsekuensinya, siapa pun boleh belajar. Didalam kitab *Ihya Ulumuddin*, pada bab ilmu, ilmu itu sendiri dibagi dalam dua kategori berdasarkan takaran kewajiban, yaitu sebagai berikut[20] :

1) Ilmu yang dikelompokkan sebagai *fardhu 'ain*, antara lain ilmu-ilmu tsaqofah bahasa Arab, sirah nabawiyah, ulumul Qur'an, ulumul hadits, tafsir, dan sebagainya.
2) Ilmu yang dikategorikan sebagai *fardhu kifayah*, antara lain ilmu yang wajib dipelajari oleh salah satu atau sebagian dari kaum Muslim. Ilmu yang termasuk dalam kelompok ini adalah

[19] Hanif, F. (2020). *Pengaruh Manajemen Syariah terhadap Kinerja Karyawan di Siti Hotel Tangerang* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
[20] Al-Ghazali, I. (2008). *Ringkasan ihya'ulumuddin*. Akbar Media.

ilmu-ilmu kehidupan yang mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan, seperti ilmu kimia, biologi, fisika, kedokteran, pertanian, teknik, dan manajemen.

b. Manajemen Sebagai Aktifitas

Sebuah amal yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. itulah yang dimaksud dengan manajemen sebagai aktivitas. Sehingga harus terikat pada aturan syar'iyah nilai, dan *hadharah* Islam. Dalam aktivitasnya, Islam memandang manajemen sebagai kebutuhan yang tak terelakkan untuk memudahkan implementasi Islam pada kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya Islam sebagai pedoman untuk berpikir dan beramal dalam kehidupan. Sebagai kaidah berpikir, akidah dan syari'ah difungsikan sebagai asas dan landasan pola pikir. Adapun sebagai kaidah amal, syari'ah difungsikan sebagai tolok ukur (standar) perbuatan.[21]

Untuk bisa membedakan secara jelas dan tegas perihal halal tidaknya atau haram tidaknya suatu kegiatan manajerial yang akan dilakukan diperlukannya sebuah tolok ukur yang syar'i. Jika aktivitas itu halal maka akan dilanjutkannya, sementara apabila aktifitas itu ternyata haram maka akan ditinggalkannya untuk menggapai keridaan Allah SWT.[22]

[21] Al-Ghazali, I. (2008). *Ringkasan ihya'ulumuddin*. Akbar Media.
[22] Al-Ghazali, I. (2008). *Ringkasan ihya'ulumuddin*. Akbar Media.

2. Esensi Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen syari'ah adalah suatu kegiatan manajerial keuangan guna mencapai suatu tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya antara prinsip-prinsip syari'ah. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno, yaitu *management* yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen juga bisa diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai suatu sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien.[23]

Manajemen Keuangan merupakan keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha guna memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen bahwa upaya memperoleh dan mengalokasikan dana harus mempertimbangkan efisiensi (daya guna) dan efektivitas (hasil guna).[24]

Manajemen Keuangan Syari'ah adalah keseluruhan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen juga berdasarkan prinsip syari'ah.[25]

---

[23] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah.

[24] Maulida, A. Z., & shi, m. Implementasi Perencanaan Keuangan Syariah Pada Pengusaha "Bella Sasirangan".

[25] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah.

Dalam teori Manajemen Syari'ah, manajemen memiliki dua pengertian, yaitu (a) sebagai ilmu, (b) sebagai rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis.[26]

Kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh dana, menggunakan dana tersebut, dan mengelola aset sesuai dengan sasaran untuk mencapai suatu tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip syari'ah, itulah yang dimaksud dengan Manajemen Keuangan Syariah.

Dengan kata lain, manajemen keuangan syari'ah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip-prinsip syari'ah).[27]

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syari'ah adalah sebagai berikut[28] :

a. Setiap usaha-usaha dalam memperoleh harta harus memperhatikan kesesuaian dengan syari'ah seperti perniagaan atau jual beli, pertanian, industri, atau jasa-jasa.
b. Objek yang diusahakan bukan sesuatu yang diharamkan.

[26] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah.
[27] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah
28 Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah

c. Harta yang diperoleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak dilarang/mubah, seperti membeli barang konsumtif, rekreasi, dan sebagainya. Namun digunakan untuk ha-hal yang dianjurkan/ sunnah, seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.

d. Dalam menginvestasikan uang, terdapat prinsip "uang sebagai alat tukar" bukan sebagai kepentingan untuk diperdagangkan. Keuangan Islam yaitu sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam (yang disebut dengan syari'ah).

Berdasarkan uraian diatas inti dari Manajemen Keuangan Syariah yakni suatu kegiatan menejerial keuangan dalam mencapai tujuannya itu memperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.[29]

3. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

a. Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Yang Diajarkan Al-Quran

Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut[30] :

1. Setiap perniagaan harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, jadi tidak ada yang merasa dirugikan atau dizalimi.

[29] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah
[30] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah

2. Penegakan prinsip keadilan (*justice*), baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs), maupun pembagian keuntungan.
3. Kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan secara universal.
4. Tidak melakukan investasi pada perdagangan atau model usaha yang diharamkan, merusak mental dan moral. Seperti narkoba dan pornografi.
5. Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik *gharar, tadlis,* dan *maysir*.
6. Dalam berdagang tidak boleh melalaikan diri dari ibadah dan mengingat Allah[31].

b. Prinsip-Prinsip Sistem Manajemen Keuangan Syari'ah

Hal yang paling mendasar dari sistem keuangan syari'ah adalah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran serta penjelasan dan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. (lebih dikenal dengan Sunnah). Prinsip-prinsip dasar sistem Manajemen Keuanan Syariah dapat dilihat paparan dibawah ini[32] :

[31] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah
[32] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah

1. Larangan Bunga

   Larangan riba atau bunga, yang dalam istilah secara harfiah berarti “kelebihan” dan artikan sebagai “peningkatan modal yang tidak dibolehkan dalam pinjaman ataupun penjualan”. Hal ini merupakan ajaran pokok dari sistem keuangan syari’ah. Lebih mudah dipahaminya, semua kelebihan pengembalian positif yang telah ditetapkan sebelumnya yang berkaitan dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman dianggap sebagai riba dan dilarang.[33]

2. Uang Sebagai Modal Potensial

   Islam mengakui nilai waktu uang, hanya ketika uang itu sebagai modal, bukan sebagai modal potensial. Uang sebagai modal hanya ketika uang tersebut digabung dengan sumber daya lain untuk difungsikan melakukan kegiatan produktif.

3. Berbagi Resiko

   Karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis dengan perjanjian akan adanya imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian risiko yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat.

[33] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah

4. Larangan Perilaku Spekulatif

   Sistem Keuangan Syari'ah melarang adanya penimbunan dan transaksi yang memberikan ketidakpastian ekstrem, perjudian, dan risiko.

5. Kesucian Kontrak

   Disini Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko dari informasi yang tidak merata dan risiko moral.

6. Aktifitas Sesuai Syariat

   Aktifitas-aktifitas yang memenuhi syarat untuk berinvestasi harus mematuhi aturan-aturan syariat.

7. Keadilan Sosial

   Semua aktifitas yang mengandung nilai ketiakadilan dan eksploitasi itu sudah seharusnya dilarang.[34]

b. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syari'ah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah SWT. Oleh karena itu, semua usaha yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan dari Allah SWT. Aturan-aturan itu tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ruang lingkup Manajemen

[34] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah

Keuangan Syari'ah sesungguhnya sangatlah luas, antara lain mencakup hal-hal seperti berikut ini.[35]

1. Manajemen Keuangan Syariah Dari Segi Aktifitasnya

Ruang lingkup Manajemen Keuangan Syari'ah dari segi aktivitasnya meliputi :

a. Aktivitas Perolehan Dana

Setiap usaha untuk mendapatkan harta seharusnya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan aturan agama, seperti *mudharabah*, musyarakah, *murabahah*, salam, *istishna*, ijarah, *sharf*, dan lain-lain.[36]

b. Aktivitas Perolehan Aktivitas

Dalam urusan menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip "uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan", hal ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah dan reksadana syariah.[37]

c. Aktivitas Penggunaan Dana

Harta yang diperoleh dipergunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif, membeli makan-makanan yang diharamkan dan sebagainya. Namun digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan, seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.[38]

[35] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah
[36] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah
[37] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah
[38] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah

2. Manajemen Keuangan Syariah Dari Segi Lembaganya

Manajemen keuangan syari'ah dari segi lembaganya, antara lain sebagai berikut.

a. Lembaga Keuangan Bank

Keuangan bank adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan secara keseluruhan, lembaga keuangan bank secara operasional dibina atau diawasi oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia. Adapun pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah dipantau oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga keuangan bank terdiri atas [39]

1. Bank Umum Syari'ah

Bank umum merupakan bank syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas transaksi pembayaran.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah

Bank pembiayaan syari'ah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandasan prinsip-prinsip syari'ah. Pada sistem konvensional dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat. Bank pembiayaan rakyat syari'ah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan.[40]

b. Lembaga Keuangan Non-Bank

Lembaga Keuangan Non-Bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank.

[39] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah
[40] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah

Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.[41]

c. Peran Manajer Keuangan Dan Aktualisasi Syari'ah

Keuangan syari'ah hampir tidak berbeda dengan keuangan konvensional karena keduanya menyangkut masalah uang, baik analisis laporan keuangan maupun manajemen keuangannya. Hanya saja, dalam konteks Manajemen Keuangan Syari'ah, literaturnya masih minin sehingga cukup menyulitkan membahasnya secara mendetail.[42]

1. Konsep Manajemen Keuangan

Manajemen Keuangan merupakan keseluruhan kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan usaha guna memperoleh dana yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Bahasan tentang cara mempergunakan dan menempatkan dana yang ada itulah yang dimaksud Manajemen Keuangan. Manajemen keuangan memiliki tiga kegiatan utama, yaitu :[43]

a. Perolehan dana, yaitu semua aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan sumber dana, baik berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan.
b. Penggunaan dana, semua aktifitas dalam menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada pada berbagai bentuk aset.

[41] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah
[42] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah
[43] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah

c. Pengelolaan aset (aktiva), yaitu aktifitas yang dilakukan setelah dana diperoleh dan telah diinvestasikan atau dialokasikan ke dalam bentuk aset (aktiva), dana harus dikelola secara efektif dan efisien.[44]

2. Tujuan dan Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan mempunyai tujuan untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan. Regulasi keuangan yang tidak perlu, yang dapat merugikan perusahaan harus bisa ditekan oleh Manajer Keuangan. Adapun fungsi Manajemen Keuangan, yaitu sebagai berikut.[45]

***a. Investment Decision* (*Keputusan Investasi*)**

Fungsi keputusan ini mempelajari tentang kegiatan, yaitu :

1. Investasi berarti penanaman modal pada aset real atau asset finansial (surat berharga).
2. Dalam keputusan investasi, manajemen harus memutuskan bentuk dana yang ada akan diinvestasikan.
3. Membeli aset dan mengelolanya ataukah bermain dengan surat berharga.
4. Keputusan ini sangat strategis yang sangat berpengaruh secara langsung terhadap besar kecilnya rentabilitas investasi serta aliran dana perusahaan pada masa mendatang.

[44] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah
[45] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah

b. Financing Decision **(*Fungsi Pendanaan*)**

Fungsi pendanaan ini mempelajari berbagai sumber dana perusahaan yang bisa diperoleh, baik berupa penambahan modal maupun utang. Fungsi ini memperhatikan sumber dana dengan biaya seminimal mungkin dan syarat yang bisa menguntungkan, baik berasal dari internal perusahaan maupun sumber dana yang berasal dari luar perusahaan (eksternal).[46]

c. Deviden Decision **(*Keputusan Deviden*)**

Dalam fungsi ini, keputusan biasanya menyangkut hal-hal seperti[47]:

1. Besaran persentase laba yang akan dibagikan kepada pemilik dalam bentuk kas.
2. Tingkat stabilitas deviden yang akan dibagikan oleh manajemen.
3. Stock devidend (dividen saham).
4. Stock split (pemecahan saham).
5. Penarikan saham yang telah beredar.

3. Kebijakan Lembaga

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi seperti serangkaian rencana, aktifitas, program, aksi, sikap dan keputusan untuk bertindak maupun tidak bertindak dari para pemangku kebijakan.[48]

[46] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah

[47] Husen Sobana, H. D. (2018). Manajemen Keuangan Syariah

[48] Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, *1*(3), 13-26.

Secara etimologi kebijakan itu berasal dari kata “bijak’: yang artinya “selalu menggunakan akal budidaya, mahir, pandai, cerdas. Kemudain dengan adanya tambahan ke-an maka kata bijak menjadi kebijakan yang artinya serangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar untuk melakukan suatu rencana melaksanakan pekerjaan dalam kepemimpinan.[49]

Dari pengertian diatas setidaknya ada dua point penting yang dapat diambil yakni : pertama suatu pengambilan keputusan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi sasaran keputusan tersebut. Dan kedua, Pengambilan keputusan yang selanjutnya memunculkan satu atau lebih keputusan untuk dijadikan garis besar untuk melakukan proses pekerjaan, profesi atau kepemimpinan.[50]

Terlepas dari pengertian diatas, maka kebijakan dalam pendidikan adalah suatu proses dalam perumusan langkah-langkah menyusun strategi pendidikan yang diturunkan dari visi, misi, pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu.[51]

4. Daya Saing

Banyak Negara di dunia mengembangkan Knowledge Based Economy (KBE) dalam menghadapi globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan syarat utama manusia berkualitas. Oleh

[49] https://www.kemhan.go.id/badiklat/2016/04/11/perbedaan-kata-kebijakan-dan-kebijaksanaan-serta-mencolok-atau-menyolok.html
(Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 149).

[50] Sabri, A. (2013). Kebijakan dan Pengambilan Keputusan dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Ta lim Journal*, *20*(2), 373-379.

[51] Sabri, A. (2013). Kebijakan dan Pengambilan Keputusan dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Ta lim Journal*, *20*(2), 373-379.

karena itu pendidikan harus digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan Education For The Knowledge Economy (EKE) serta berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk-produk riset unggulan. Manusia yang berkualitas dalam Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat menentukan kemampuan bangsa menuntut daya saing tinggi dalam memasuki kompetensi global dan ekonomi pasar bebas yang cepat berkembang . Oleh karena itu, pendidikan dituntut agar mengantarkan bangsa Indonesia dalam persaingan global meraih keunggulan[52]

Daya saing berasal dari kata daya dan saing . Daya bermakna kekuatan, sedangkan saing berarti mencapai lebih dari yang lain, beda dengan yang lain dari segi mutu, memiliki keunggulan tertentu. Dengan demikian daya saing dapat bermakna kekuatan untuk berusaha menjadi unggul dalam hal tertentu yang dilakukan seseorang, kelompok atau institusi tertentu. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan memperkokoh posisi pasarnya, kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya, kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti, dan kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan. Daya saing dalam sebuah bangsa merupakan himpunan faktor, kebijakan dan kelembagaan yang menentukan tingkat produktifitas suatu bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan global dengan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan bangsa tersebut.[53]

[52] Amirudin, M. F. (2019). Hubungan Pendidikan dan Daya Saing Bangsa. *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, *4*(1), 35-48.

[53] Amirudin, M. F. (2019). Hubungan Pendidikan dan Daya Saing Bangsa. *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, *4*(1), 35-48.

5. Era Pandemi Covid-19

Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19.[54]

Pandemi itu sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, biasanya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu.[55]

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan pembahasan dan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Sebelum membuat tesis ini penulis melakukan pencarian terhadap kajian pustaka yang berupa, jurnal, skripsi, dan desertasi yang telah ada sebagai pembanding atau melanjutkan dari penelitian yang sudah ada dengan melakukan penyempurnaan atau menambahkan variabel-variabel yang berbeda. Penelitian terdahulu yang penulis jadikan pembanding antara lain sebagai berikut :

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Misbakul Munir Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah

[54] Junieles, R. (2020). Register Kesehatan Era Pandemi Covid-19 Dalam Komunikasi Di Berbagai Media Online. *Tabasa:Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya*,*1*(1), 81-95.

[55] https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/

Al Wafa, Bogor, 12860, Indonesia tahun 2021 yang berjudul Resiliensi Ekonomi Rumah Tangga Muslim Yogyakarta Masa Adaptasi Pandemi Covid-19. Menyimpulkan bahwa pandemic Covid-19 adalah pandemic global atau telah menjadi bencana Nasional. Dan hal ini memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat di Indonesia yang sangat serius. Salah satunya berdampak pada masyarakat Yogyakarta. Namun fenomena ini menjadi sangat menarik karena disitulah kreatifitas masyarakat penduduk kota pelajar ini untuk bertahan ditengah himpitan kebutuhan harus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pelaku usaha rumah tangga untuk menghadapi pandemi global ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kreatifitas pelaku usaha rumah tangga di Yogyakarta semakin meningkat dengan mengikuti perkembangan yang ada.[56]

Pelaku usaha rumah tangga bisa mengikuti perkembangan tekhnologi saat ini seperti: pertama, menggunakan media online untuk memasarkan produknya, seperti lewat whatsapp, facebook, telegram group, dan plat form lainnya. Yang kedua penguatan pelaku UMKM maupun pelaku usaha rumah tangga melalui group-group media social. Dan yang ketiga kolaborasi antara pelaku usaha rumah tangga. Kesimpulan dari penelitian ini yakni pelaku usaha rumah tangga muslim

[56] Muhammad Misbakul Munir1*
1Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, 12860, Indonesia

di Yogyakarta tetap bisa *survive* dalam menghadapi pandemi meskipun dengan segala keterbatasan.[57]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Magdahalena Tjalla Prodi Tadris Bahasa Inggris IAIN Parepare tahun 2020 dengan judul Era Kenormalan Baru dan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Indonesia : Tantangan dan Peluang. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tantangan pendidikan tinggi di masa pandemi dan era kenormalan baru juga peluang yang diperoleh.[58]

   Hasil dari penelitian ini bahwa Pandemi covid-19 telah melahirkan beberapa inovasi pendidikan berbaisi teknologi. Pendidik di era pandemi dituntut untuk mampu menggunakan teknologi pembelajaran yang menarik dan teknik penilaian yang mengukur pembelajaran di masa kenormalan. Disrupsi teknologi di bidang pendidikan saat era pandemi oleh pemerintah adalah suatu keniscayaan. Perguruan Tinggi harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pendidikan Tinggi harus berinovasi menciptakan metode pembelajaran yang sesuai di era kenormalan baru.[59]

3. Penelitian yang dilakukan oleh Triyana Iskandasyah, Drs, M.Si yang berjudul Pengaruh Resiliensi Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa, tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh tingkat

[57] Muhammad Misbakul Munir1*
1Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, 12860, Indonesia
[58] Magdahalena, M. (2020). Era kenormalan baru dan pendidikan di perguruan tinggi di indonesia: tantangan dan peluang.
[59] Magdahalena, M. (2020). Era kenormalan baru dan pendidikan di perguruan tinggi di indonesia: tantangan dan peluang.

resiliensi pada prestasi hasil belajar. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat resiliensi mahasiswa ketika awal masuk kuliah dapat dikatakan pada kategori resiliensi yang baik. Dan Pengaruh dari resiliensi terhadap prestasi akademik mahasiswa sebesar 0,325 dengan koefisien Determinasi sebesar 0,106 atau dapat dikatakan pengaruhnya hanyalah sebesar 10,6% terhadap prestasi hasil belajar.[60]

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Chita Putri Harahap, Samsul Rivai Harahap, Dinda Permatasari Harahap dengan judul Gambaran Relisiensi Akademik Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19, tahun 2020. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi atau gambaran dimana mahasiswa harus tetap mampu menunjukkan resiliensi akademik mahasiswa di era pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian ini adalah diketahInstitut Agama Islam Negeriya bahwa resiliensi akademik mahasiswa BKI berada pada posisi atau kategori tinggi dengan presentase 63,12% dan pada kategori sedang sebesar 36,88%.[61]

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 mahasiswa BKI tidak hanya mampu bertahan didalam keadaan yang sulit, penuh dengan tekanan, tuntutan tugas yang banyak, keadaan ekonomi yang menurun, dan berbagai permasalahan lainnya, tetapi juga

[60] Iskandarsyah, T., Novieningtyas, A., Teressia, A., & Pratikna, R. N. (2017). Pengaruh resiliensi terhadap hasil belajar mahasiswa.

[61] Harahap, A. C. P., Harahap, S. R., & Harahap, D. P. S. (2020). Gambaran resiliensi akademik mahasiswa pada masa pandemi COVID-19. *AL-IRSYAD*, *10*(2).

mampu keluar dari tekanan-tekanan akademik yang dialami ketika pembelajaran selama virtual atau daring di era pandemi Covid-19.[62]

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Herenda Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2021 dengan judul Kontribusi Self-Disclosure Terhadap Resiliensi Karyawan Kantor Di Masa Pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengungkapan diri (*Self-Disclosure)* terhadap resiliensi karyawan kantor di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa terdapat pengaruh pengungkapan diri (*Self-Disclosure)* terhadap resiliensi karyawan kantor di masa pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan oleh hasil dari uji regresi linier sederhana dengan Self-Disclosure berkontribusi sebesar 26,2%.[63]

C. Kerangka Konsep Penelitian

Pandemi covid-19 telah berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat. Dampak langsung dari pandemic ini adalah ekonomi; pendapatan masyarakat berkurang karena kebanyakan orang menahan untuk tidak membeli barang-barang bukan kebutuhan primer. Berkurangnya penjualan dan pembelian barang di masyarakat pada akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan dan belanja masyarakat. Setiap keluarga kemudian menata ulang barang-barang dan jasa kebutuhan keluarga yang sangat perlu, perlu, cukup

[62] Harahap, A. C. P., Harahap, S. R., & Harahap, D. P. S. (2020). Gambaran resiliensi akademik mahasiswa pada masa pandemi COVID-19. *AL-IRSYAD*, *10*(2).
[63] Herenda, N. (2021). *Kontribusi Self-Disclosure Terhadap Resiliensi Karyawan Kantor Di Masa Pandemi Covid-19* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

perlu, dan tidak perlu untuk dibeli atau dibelanjakan. Pengaturan ulang belanja setiap keluarga, pada ujungnya berpengaruh terhadap kebutuhan-kebutuhan skunder lainnya, misalnya pendidikan anak, belanja kebutuhan belajar, penambahan jam esktra belajar. Penataan ulang kebutuhan belajar keluarga pada akhirnya berpengaruh terhadap lembaga-lembaga pendidikan di masyarakat, terutama lembaga pendidikan swasta.

Pengetatan pengeluaran keuangan setiap lembaga, terutama untuk kebutuhan skunder (pendidikan), dampaknya semakin banyak mahasiswa yang mengajukan surat permohonan keringanan uang kuliah tunggal (UKT). Bagi Perguruan Tinggi, UKT merupakan sumber pendapatan utama. Pengurangan pendapatan dari UKT bermakna secara finansial pendapatan Perguruan Tinggi akan berkurang. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi perlu melakukan refocusing penganggaran kebutuhan rutin dan insidental lembaga, re-efisiensi layanan akademik dan non-akademik. Refocusing tidak serta merta mengurangi program dan kegiatan, tetapi menata ulang skala prioritas anggaran masing-masing unit sesuai dengan kebutuhan akreditasi jurusan. Program dan kegiatan-kegiatan yang tidak secara langsung mendukung meningkatkan point penilaian assesment lapangan (AL) akreditasi jurusan, maka sebaiknya di tidadakan atau dikurangi volumenya.

Lembaga melakukan evaluasi dan peninjauan kembali Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembaga (RAPBL). Selain itu, lembaga perlu melakukan usaha-usaha lainnya yang memungkinkan dapat menambah pendapatan lembaga. Pendapatan lembaga dalam kaitannya dengan program

dan kegiatan-kegiatan lembaga tidak selalu harus diukur dari finansial, tetapi juga ada pendapatan nonfinansial. Pendapatan nonfinansial juga dapat dimanfaatkan untuk mensupport program dan kegiatan lembaga. Dengan pertimbangan dan estimasi pendapatan finansial dan non-finansial, pendapatan langsung dan non-langsung kemudian disusun program dan kegiatan tahunan yang relevan dengan kebutuhan akreditasi masing-masing jurusan. Pemetaan total estimasi pendapatan finansial dan pendapatan nonfinansial lembaga kemudian dibagi-bagi pada masing-masing unit lembaga sesuai standar dan pedoman pengelolaan lembaga diera pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil estimasi pendapatan rutin dan non-rutin lembaga, maka pimpinan lembaga menetapkan arah kebijakan lembaga dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan pencapaian visi dan misi lembaga sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) lembaga. Kebijakan yang diputuskan pada era pandemi tidak akan bertentangan dengan RIP, tetapi hanya mengurangi atau refocusing dari kegiatan-kegiatan yang dapat ditunda beberapa waktu atau efisiensi. Diantara program dan kegiatan yang tetap harus menjadi pertimbangan utama adalah; 1) Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat; 2) Pengembangan dan kerjasama; 3) penguatan kapasitas sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan). Ketiga program ini dapat dilakukan dengan mempertimbangan ketersediaan anggaran. Dan, bahkan akan lebih baik jika dilakukan tanpa membebani anggaran lembaga secara signifikan.

Pimpinan dan pengelola lembaga hendaknya dapat mempertimbangkan pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terlalu banyak membebani anggaran lembaga. Melakukan pemetaan untuk tercapainya tujuan program dan kegiatan melalui kegiatan-kegitan alternatif dan efisien perlu menjadi pertimbangan. Efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilakukan diantaranya dengan berbasis digital. Digitalisasi program dan kegiatan berdasarkan pengalaman beberapa lembaga dan individu lebih efisiensi dan efektif ketimbang dilaksanakan secara offline. Diantara kegiatan yang dapat dilaksanakan secara daring adalah pembelajaran, penelitian, pengabdian, kerjasama, penguatan kapasitas sumber daya manusia lembaga, dan implementasi kerjasama di berbagai bidang lembaga Perguruan Tinggi. Dengan demikian, pimpinan dapat melakukan reorientasi program dan kegiatan secara lebih efektif dan efisien.

Reorientasi dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan branding lembaga. Dalam situasi normal, pandemi, atau kenormalan baru maka persaingan merupakan suatu keniscayaan. Semua individu atau lembaga/organisasi tidak dapat menghindar dari persaingan. Meskipun demikian, di era serba komplek dan tidak terprediksi persaingan dapat dicapai melalui program dan kegiatan yang bersifat kolaboratif/kerjasama. Setiap lembaga atau individu tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan secara individualistik. Kerjasama dapat menjadi amunisi baru, karena hakikatnya setiap lembaga atau individu memiliki kelemahan dan kelebihan. Penyatuan antara dua atau lebih suatu lembaga dalam pencapaian program dan kegiatan

akan dapat menguatkan daya saing atau mutu suatu lembaga. Oleh karena itu, kerjasama dan persaingan tidak bisa dipisahkan tetapi sebagai satu kesatuan pencapaian mutu lembaga yang berdaya saing tinggi.

Resiliensi lembaga dalam situasi dan kondisi pandemic

yang tidak berkesudahan merupakan upaya yang harus dilakukan oleh setiap lembaga atau organisasi. Melihat potensi dan kelemahan internal dan eksternal lembaga merupakan bagian penting dalam melakukan reorientasi resiliensi lembaga. Setiap tantangan, baik dari aspek internal maupun eksternal akan melahirkan potensi latent. Setiap perubahan kondisi internal dan eksternal lembaga akan melahirkan kesatria dan/atau program-kegiatan yang prospektif dapat melahirkan budaya mutu baru suatu lembaga. Kelenturan dalam berfikir, bersikap, dan bertindak dalam memutuskan kebijakan-kebijakan lembaga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek internal-eksternal lembaga. Strategi demikian dapat lebih mudah diiplementasikan oleh lembaga pendidikan swasta seperti Universitas Islam Blitar (UNISBA) dan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU).

Kerangka Konsep Penelitian mendefinisikan, menjelaskan hubungan antar kata kunci (konsep) dari penelitian ini. Kerangka teoritik penelitian karya ilmiah ini sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut.

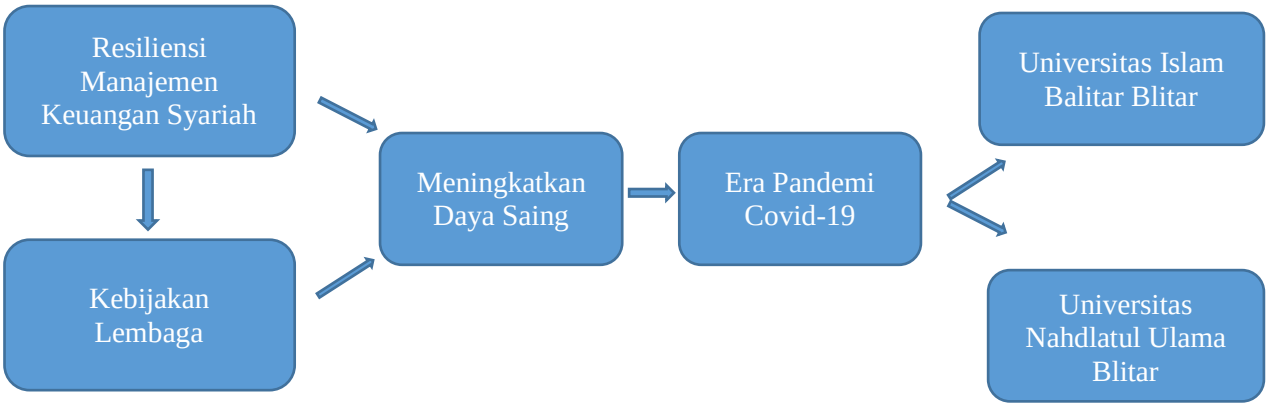

Bagan 1.
Kerangka Konsep Penelitian